



Bentuk Tatanan Pemerintahan Dalam Mewujudkan Kesejahteraan Dan Kedamaian Sosial: Strategi Inovasi Pengawasan emerintahan di Daerah Kota Bogor

Rahma Nurhalizal

Program Studi Ilmu Pemerintahan, Universitas Padjadjaran

Miska Salsabila

Program Studi Ilmu Pemerintahan, Universitas Padjadjaran

Ivan Darmawan

Program Studi Ilmu Pemerintahan, Universitas Padjadjaran

Alamat: Jln. Ir. Soekarno km. 21 Jatinangor, Kab. Sumedang 45363 Jawa Barat. Telepon (022) 842 88888 Faksimile (022) 842 88898

Korespondensi penulis: rahma22002@mail.unpad.ac.id

Abstract. *Government oversight is very important in ensuring accountability and transparency in public administration, especially in the context of regional autonomy. This research examines the challenges and strategies in improving government oversight mechanisms in the City of Bogor, Indonesia. The main findings highlight the importance of strengthening internal oversight institutions such as Regional Inspectorates through capacity building and the use of technology. Innovations such as digital platforms for public participation and performance evaluation systems have been successfully implemented to increase transparency and efficiency in the delivery of public services. However, its implementation overcomes challenges such as limited resources and varying levels of community participation. This research provides further grants from technological advances and a strong regulatory framework to increase the effectiveness of government oversight and reduce the risk of corruption and irregularities in Bogor City government processes.*

Keywords: *Government Oversight, Bogor City, Strategy and Innovation.*

Abstrak. Pengawasan pemerintahan merupakan hal yang sangat penting dalam memastikan akuntabilitas dan transparansi dalam administrasi publik, terutama dalam konteks otonomi daerah. Penelitian ini mengkaji tantangan dan strategi dalam meningkatkan mekanisme pengawasan pemerintahan di Kota Bogor, Indonesia. Temuan utama menyoroti pentingnya memperkuat lembaga pengawasan internal seperti Inspektorat Daerah melalui peningkatan kapasitas dan pemanfaatan teknologi. Inovasi seperti platform digital untuk partisipasi publik dan sistem evaluasi kinerja telah berhasil diterapkan untuk meningkatkan transparansi dan efisiensi dalam penyelenggaraan layanan publik. Namun, implementasi menghadapi tantangan seperti sumber daya yang terbatas dan tingkat partisipasi masyarakat yang bervariasi. Penelitian ini merekomendasikan integrasi lebih lanjut dari kemajuan teknologi dan kerangka regulasi yang kuat untuk meningkatkan efektivitas pengawasan pemerintahan dan mengurangi risiko korupsi serta penyimpangan dalam proses pemerintahan Kota Bogor.

Kata Kunci: Pengawasan Pemerintahan, Kota Bogor, Strategi dan Inovasi.

PENDAHULUAN

Pemerintah mengacu pada sistem atau sekelompok orang yang mengatur komunitas terorganisir, seringkali berupa negara. Pada intinya, ini adalah mekanisme penegakan kebijakan negara, serta sarana untuk menentukan kebijakan yang harus dipatuhi oleh setiap anggota masyarakat. Definisi pemerintah di dalam disiplin ilmu pemerintahan adalah seluruh lembaga atau institusi yang dianggap mampu dan memiliki kapasitas, baik secara teoritis

maupun praktis untuk memproses layanan publik dan memberikan layanan kebutuhan sipil (Sari, 2020). Oleh karena itu, pemerintahan terdiri dari para aktor yang memegang peran, yang memiliki keyakinan, minat, komitmen, dan tujuan, serta yang berada dalam hubungan dan jaringan sosial yang melibatkan individu lain baik di dalam maupun di luar koridor kekuasaan (Little, 2020). Pemerintah bertanggung jawab untuk membuat dan menegakkan hukum, mengatur urusan nasional, dan menyediakan fasilitas dasar bagi warganya.

Pemerintahan membutuhkan tatanan yang baik untuk memberikan pelayanan masyarakat yang baik demi mewujudkan kesejahteraan dan kedamaian sosial. Secara umum tatanan pemerintahan yang baik atau *good governance* merujuk kepada seluruh proses dalam pengelolaan pemerintahan dengan keterlibatan berbagai stakeholders secara luas, baik dalam bidang ekonomi, bidang sosial dan politik suatu negara, bidang pendayagunaan sumber daya alam (SDA), maupun bidang sumber daya manusia (SDM) yang mengedepankan kepentingan bersama, dengan berpegang kepada prinsip-prinsip kejujuran, keadilan, kebersamaan, transparansi, efisiensi, dan akuntabilitas (Djumadi et al., 2018). Dalam hal ini *United National Development Program* (UNDP, 2021) juga mendefinisikan tata pemerintahan yang baik sebagai sistem pemerintahan yang mampu, responsif, inklusif, dan transparan. Dapat disimpulkan jika tata pemerintahan memiliki hubungan yang signifikan dengan kesejahteraan dan kedamaian sosial.

Sejatinya kesejahteraan dan kedamaian sosial adalah idealisme suatu negara atau daerah yang sulit dicapai dan dilihat secara tepat dan pasti. Gagalnya suatu pemerintah dalam menjaga keseimbangan pada masyarakat akan sangat berdampak kepada kesejahteraan dan kedamaian pada masyarakat. Menurut Badan Pusat Statistik (BPS, 2023), kesejahteraan dapat dilihat dari delapan bidang, yaitu Bidang Kependudukan, Bidang Kesehatan dan Gizi, Bidang Pendidikan, Bidang Ketenagakerjaan, Bidang Taraf dan Pola Konsumsi, Bidang Perumahan dan Lingkungan, Bidang Kemiskinan, serta Bidang Sosial lainnya yang dapat menjadi suatu acuan sebagai upaya peningkatan kualitas hidup. Kesejahteraan dan kedamaian sosial merupakan aspek yang saling terikat, dimana terciptanya suatu kedamaian sosial adalah dikarenakan adanya masyarakat yang sejahtera dan begitupun sebaliknya. Sehingga peran serta pemerintah dalam menjaga keseimbangan kesejahteraan dan kedamaian sosial masyarakat menjadi cakupan yang sangat penting untuk diperhatikan dalam mengembangkan sebuah wilayah atau negara.

Pemerintah harus mengadopsi standar yang jelas dan menyeluruh jika mereka ingin menerapkan tata pemerintahan yang berkualitas di lingkungan pemerintahan. Prinsip-prinsip

good governance yang telah diakui secara luas adalah metode yang umum digunakan. Kerangka kerja yang mendalam dan terperinci yang terdapat dalam prinsip-prinsip ini memungkinkan penerapan tata pemerintahan yang baik, termasuk partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan keputusan (*participation*), akuntabilitas pemerintah terhadap warga negara (*accountability*), keberlakuan aturan hukum yang adil dan berlaku bagi semua (*rule of law*), transparansi dalam menjalankan urusan publik (*transparency*), upaya mencapai kesepakatan yang konsensual dalam pengambilan keputusan (*consensus orientation*), keadilan dalam mendistribusikan sumber daya dan manfaat (*equity*), efektivitas dan efisiensi dalam menjalankan program-program pemerintah (*effectiveness and efficiency*), sikap profesionalisme dalam penanganan urusan publik (*professionalism*), pengembangan visi strategis jangka panjang untuk pembangunan nasional (*strategic vision*), dan responsivitas pemerintah terhadap kebutuhan (*responsiveness*) (Djumadi, 2018). Dengan terlaksananya prinsip-prinsip tersebut, pemerintah dapat meningkatkan kualitas layanan publik, meningkatkan kepercayaan masyarakat, dan membangun fondasi yang kokoh untuk pembangunan yang berkelanjutan dengan memperkuat prinsip-prinsip *good governance* ini.

Bagaimana bentuk tatanan pemerintahan dan upayanya dalam menjaga stabilitas kesejahteraan dan kedamaian pada masyarakat perlu diperhatikan secara mendalam, sehingga pemerintah harus menjalankan fungsinya dengan sebagaimana mestinya. Dimana pemerintahan harus berfungsi aktif dalam pelayanan publik (*service*), pemberdayaan (*empowerment*), dan pembangunan (*development*) (Sari, 2020). Oleh karena itu, pemerintahan harus memikirkan tata pemerintahan yang baik untuk menjalankan fungsinya dengan efektif. Dalam hal ini, esensi dari terbentuknya tatanan pemerintahan yang baik, dapat dicirikan dengan pelayanan publik yang baik pula kepada masyarakat. Maka dari itu, keseimbangan pada masyarakat juga didasari oleh bagaimana bentuk tatanan pemerintah yang diterapkan.

TINJAUAN TEORITIS & PRAKTIS

Konsep Kesejahteraan dan Kedamaian Sosial

Meninjau dari KBBI atau kamus besar bahasa Indonesia, kesejahteraan adalah sebuah keadaan yang sifatnya sejahtera, keamanan, keselamatan, ketentraman, kemakmuran, dan lain sebagainya. Dalam pengertian lain menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 tahun 1998 adalah bahwa kesejahteraan sosial merupakan suatu tata kehidupan dan penghidupan sosial baik material maupun spiritual yang diliputi oleh rasa keselamatan, kesusilaan, ketentraman lahir dan batin yang memungkinkan seseorang bagi setiap warga

negara untuk mengadakan pemenuhan kebutuhan jasmani, rohani, dan sosial yang sebaik-baiknya bagi diri, keluarga, serta masyarakat dengan menjunjung tinggi hak dan kewajiban asasi manusia sesuai dengan Pancasila. Kegiatan untuk mewujudkan kesejahteraan sosial dapat dilakukan oleh pemerintah maupun swasta untuk bisa memberikan kontribusi terhadap permasalahan sosial yang ada di masyarakat (Husna, 2014).

Dalam prosesnya, kesejahteraan sendiri memiliki makna yang sangat luas. Pemaknaan yang sifatnya luas tersebut karena adanya suatu pembahasan tentang kesejahteraan sosial yang memiliki ruang lingkup tertentu, misalnya adalah menurut UU Nomor 6 tahun 1974 yang hanya berisi pokok kesejahteraan sosial, kesejahteraan sebagai suatu sistem organisasi yang diimplementasikan oleh LSM atau lembaga swadaya masyarakat, panti-panti sosial, dan lain sebagainya. Dalam pengertian lain, kesejahteraan sosial juga dapat dimaknai sebagai sebuah gerakan atau aktivitas manusia yang bisa meningkatkan taraf hidup manusia agar bisa bersaing di lingkungan masyarakat. Berdasarkan arti tersebut, dapat dimaknai bahwa kesejahteraan sosial adalah suatu ilmu karena pada kesejahteraan sendiri mencakup konsep, teori, metode, dan paradigma (Husna, 2014).

Menurut Kaynak (2014), Kedamaian sosial memiliki peran yang sangat vital dalam memelihara kehidupan sosial yang stabil dan harmonis, yang merupakan fondasi bagi kemajuan dan kesejahteraan masyarakat. Ini melibatkan upaya berkelanjutan untuk mengatasi ketegangan internal yang dapat mengganggu keseimbangan sosial. Dengan mempromosikan dialog, toleransi, dan pemahaman yang lebih baik antara berbagai kelompok dan individu dalam masyarakat, kedamaian sosial mendorong terciptanya hubungan yang lebih harmonis dan produktif di antara mereka.

Selain itu, dalam konteks politik sosial, kedamaian sosial menjadi salah satu pilar utama dalam menjaga stabilitas nasional dan internasional. Melalui penyelesaian konflik secara damai dan diplomasi, politik sosial bertujuan untuk meminimalkan potensi kerusuhan dan perpecahan yang dapat mengancam integritas sosial sebuah negara atau bahkan keamanan global. Dengan demikian, kedamaian sosial tidak hanya merupakan tujuan akhir dalam dirinya sendiri, tetapi juga merupakan fondasi bagi pembangunan sosial yang berkelanjutan dan menciptakan kondisi yang mendukung pertumbuhan ekonomi, perkembangan budaya, dan kesetaraan di masyarakat.

Peran Tatanan Pemerintahan dalam Mewujudkan Kesejahteraan dan Kedamaian

Pemerintah dalam mewujudkan kesejahteraan sosial adalah dengan melalui pendorongan kesejahteraan yang ada pada masyarakat melalui penurunan angka kemiskinan di

masyarakat. Menurut Barton dalam Sukriska et al (2018), terdapat empat peran tatanan pemerintah dalam mewujudkan kesejahteraan, yakni

1. Peran Alokasi Sumber Daya

Pada peran alokasi sumber daya, pemerintah memakmurkan melalui sektor perekonomian yakni melalui sektor publik dan sektor swasta dengan penyediaan barang yang sifatnya publik serta pelayanan guna mencapai tujuan kesejahteraan sosial bagi masyarakat

2. Peran Regulator

Sebagai regulator, pemerintah membuat suatu aturan atau undang-undang guna mencapai tata tertib yang mengatur dunia bisnis dan hak-hak yang ada di masyarakat

3. Peran kesejahteraan sosial

Peran ini mencakup kebijakan yang dikeluarkan guna dengan tujuan pemerataan sosial di negara, misalnya adalah pajak, jaminan sosial, dan lainnya

4. Peran Mengelola ekonomi

Peran ini adalah peran yang digunakan untuk bisa memfasilitasi stabilitas dan kemakmuran ekonomi pada negara melalui suatu kebijakan.

Peran tatanan pemerintahan dalam mewujudkan kesejahteraan sosial juga berdampak pada terciptanya kedamaian dalam masyarakat. Melalui alokasi sumber daya yang bijaksana, regulasi yang adil, kebijakan kesejahteraan sosial yang merata, dan manajemen ekonomi yang stabil, pemerintah tidak hanya memperjuangkan penurunan angka kemiskinan, tetapi juga menegakkan hukum, membangun hubungan internasional yang harmonis, memperkuat dialog antar-kelompok, dan mengimplementasikan pembangunan yang berkelanjutan. Dengan demikian, pemerintah menjadi kunci utama dalam menciptakan kondisi yang mendukung perdamaian serta kestabilan dalam masyarakat.

Upaya Pemerintah Dalam Mewujudkan Kesejahteraan Dan Keadilan Sosial

Menurut penelitian oleh Nagaring et al (2021), salah satu upaya pemerintah dalam mengatasi PMKS (penyandang masalah kesejahteraan sosial) di kota Manado melalui kebijakan-kebijakan. Salah satunya adalah dengan mengurus anak-anak yang terlantar di kota Manado melalui pendataan anak terlantar di seluruh kota, memberikan pengarahan, dan sosialisasi kepada orang tua untuk bisa mengawasi anak-anak tersebut dan tidak ditelantarkan begitu saja. Kemudian, pada kebijakan lain pemerintah juga memberikan suatu bantuan dengan melakukan kerja sama dengan rumah singgah atau panti asuhan untuk bisa menampung anak-

anak terlantar yang sudah tidak ada orang tua. Hal tersebut juga sesuai dengan pasal 34 UUD tentang “anak terlantar dan fakir miskin dipelihara oleh Negara”.

Kemudian, menurut penelitian lain oleh Sukrisna et al (2018), pemerintah Kabupaten Buleleng Bali menerapkan suatu kebijakan untuk bisa mengatasi kesejahteraan rumah tangga miskin di kecamatan Gerokgak melalui norma modal sosial. Hasilnya, peran pemerintah memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap norma, jaringan, dan kepercayaan modal sosial di Kecamatan Gerokgak, yang pada gilirannya meningkatkan kesejahteraan rumah tangga miskin. Meskipun peran pemerintah secara langsung tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap kesejahteraan, penelitian menunjukkan bahwa jaringan modal sosial bertindak sebagai mediator yang penting dalam hubungan antara peran pemerintah dan kesejahteraan rumah tangga miskin, menekankan pentingnya intervensi yang lebih terfokus pada pembangunan modal sosial untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Berdasarkan kedua contoh tersebut, dapat disimpulkan bahwa pemerintah memiliki peran yang signifikan dalam upaya mewujudkan kesejahteraan sosial di masyarakat melalui kebijakan-kebijakan yang dilakukannya. Contohnya, di kota Manado, pemerintah telah mengambil langkah-langkah konkret untuk mengatasi permasalahan anak terlantar dengan melakukan pendataan, memberikan pengarahan kepada orang tua, serta menjalin kerja sama dengan lembaga penampungan anak. Sementara itu, di Kabupaten Buleleng, pembangunan modal sosial menjadi fokus utama pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat, yang menunjukkan komitmen mereka untuk menciptakan lingkungan yang lebih baik bagi seluruh warganya.

PEMBAHASAN

Strategi Implementasi Pemerintahan Yang Efektif

Dalam proses penyusunan tatanan pemerintahan, perlu suatu sistem yang efektif guna mendukung terwujudnya tatanan pemerintahan yang mampu mewujudkan kesejahteraan dan kedamaian sosial. Terdapat tiga strategi, yakni:

1. Pendekatan Integratif dalam Kebijakan Publik

Perlu adanya pendekatan integratif dalam kebijakan publik dengan melalui penggabungan berbagai macam kebijakan dan pemangku kepentingan untuk bisa mensejahterakan dan kedamaian sosial. Melalui pendekatan ini permasalahan sosial tidak bisa serta merta diselesaikan melalui pendekatan tunggal, oleh karena itu perlu sebuah sinergi antar sektor, lembaga, dalam proses pengambilan keputusan. Sebagai contohnya

adalah menurut Nagaring et al (2021), untuk mengatasi anak terlantar pemerintah harus bekerja sama dengan lembaga swadaya masyarakat untuk bisa mengatasi permasalahan atas anak-anak terlantar di Makassar. Melalui penerapan dengan pendekatan ini, kebijakan dapat bisa lebih efektif untuk menanggulangi tantangan sosial yang sifatnya kompleks, seperti kemiskinan, ketidaksetaraan, konflik, dengan cara memperhatikan koneksi antar aspek kehidupan masyarakat dengan memastikan solusi yang dihasilkan mampu secara nyata memberikan suatu manfaat bagi seluruh lapisan masyarakat.

2. Pemberdayaan Masyarakat dalam Proses Pembuatan Kebijakan

Melalui pemberdayaan masyarakat dalam proses pembuatan kebijakan, akan tercipta suatu partisipasi aktif dan sifatnya inklusi dari berbagai lapisan masyarakat pada tahap pembuatan kebijakan publik. Melalui pendekatan ini, masyarakat menjadi pihak yang lebih mengetahui masalah kesejahteraan dan kedamaian dan harus memiliki akses keterlibatan dalam merumuskan suatu solusi. Hal tersebut bisa berupa forum diskusi publik, konsultasi, dan pemerintah secara langsung dapat dapat mendengarkan aspirasi masyarakat. Dalam hal lain pemberdayaan masyarakat dapat pula dengan melibatkan pendidikan serta pelatihan untuk bisa meningkatkan kapasitas masyarakat pada proses partisipasi yang sifatnya efektif dalam proses pembuatan kebijakan.

3. Penguatan Institusi Demokrasi

Penguatan institusi demokrasi memiliki tujuan untuk bisa memperkuat demokrasi yang ada pada suatu negara itu sendiri dengan melalui sebuah reformasi kelembagaan. Hal tersebut mencakup peningkatan kapasitas dari lembaga demokratis, yakni seperti parlemen, pengadilan, dan badan pengawas pemilu untuk bisa menjalankan fungsi secara efektif dan transparan. Menurut Setiawan (2017), terdapat rekomendasi adanya BPK atau Blok Politik Kesejahteraan. BPK sendiri dapat terbagi menjadi tiga kelompok, yakni penyusun kebijakan, penekan dan aksi massa, kelompok lobi di parlemen dan partai politik yang mengangkat isu kesejahteraan. Dengan penguatan institusi demokratis juga dapat melibatkan partisipasi secara aktif dari masyarakat itu sendiri pada proses politik, yakni termasuk pula hak untuk bisa menyampaikan pendapat, memilih pemimpin, dan partisipasi dalam membuat suatu kebijakan. Alhasil, aspirasi masyarakat tentang kesejahteraan dapat lebih tertampung dan mendukung terciptanya kesejahteraan dan kedamaian sosial.

4. Jaminan Sosial

Sistem pelayanan sosial yang disebut jaminan sosial melindungi individu dan keluarga dari berbagai ancaman sosial dan ekonomi. Sistem ini memastikan bahwa pendapatan

tidak akan hilang karena kecelakaan, cacat, penyakit, pengangguran, kehamilan, usia lanjut, atau kematian (Kiswanto, 2005). Jaminan sosial sebagai hak dasar warga negara, menjadi tanggung jawab negara dalam memenuhi hak tersebut sekaligus menjadi strategi yang efektif dalam mewujudkan kesejahteraan sosial dan kedamaian sosial. Dengan menyediakan berbagai bentuk bantuan dan perlindungan, jaminan sosial bertujuan untuk memastikan bahwa orang-orang memiliki akses yang adil dan layak terhadap fasilitas kesejahteraan. Jaminan sosial juga dapat membantu mengurangi ketidakpastian finansial dan meningkatkan kualitas hidup secara keseluruhan.

Evaluasi Kebijakan dan Praktik Pemerintah dalam Mewujudkan Kesejahteraan dan Kedamaian Sosial

Salah satu komponen penting dalam pembangunan suatu negara adalah evaluasi kebijakan dan praktik pemerintah dalam mewujudkan kesejahteraan dan kedamaian sosial. Proses evaluasi ini mencakup penilaian seberapa efektif kebijakan yang diterapkan oleh pemerintah serta praktik-praktik yang dilakukan dalam rangka mencapai tujuan kesejahteraan dan kedamaian sosial. Evaluasi juga merupakan langkah yang harus dilakukan setiap saat oleh pemerintahan untuk menjaga kestabilan negara. Partisipasi publik yang aktif memungkinkan pemerintah untuk mendapatkan masukan dan umpan balik yang berharga untuk meningkatkan kebijakan dan praktik yang ada. Selain itu, evaluasi yang berkelanjutan dan berbasis bukti juga diperlukan untuk memastikan bahwa kebijakan dan praktik pemerintah tetap relevan dan efektif meskipun perubahan sosial dan ekonomi terus terjadi.

Salah satu upaya evaluasi yang dapat dilakukan dalam rangka melakukan optimalisasi pelayanan publik, pemerintah selama satu dekade terakhir melakukan reformasi Administrasi Publik. Dalam konteks global saat ini, reformasi telah menjadi prioritas yang mendesak karena perlunya adaptasi terhadap perubahan dinamika kehidupan sosial dan politik yang terus berubah, sehingga reformasi dianggap sebagai langkah penting dalam menangani sejumlah isu nasional yang mendesak, seperti tingginya tingkat korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN), rendahnya kepuasan masyarakat terhadap kualitas pelayanan publik, dan ketidakmampuan pemerintah untuk menangani berbagai masalah publik yang kompleks (Kadarisman et al., 2021). Jika pemerintah dapat menyelesaikan ketiga masalah tersebut, evaluasi reformasi birokrasi dapat dianggap berhasil. Setelah reformasi administrasi publik dimulai, banyak agenda yang menjadi masalah publik masih belum diselesaikan, seperti masalah KKN yang semakin meningkat, dan masyarakat umum masih kurang puas dengan kinerja pelayanan publik. Akibatnya, reformasi tidak hanya diperlukan untuk meningkatkan daya saing dan

kesejahteraan negara, tetapi juga sebagai tanggapan terhadap keinginan masyarakat untuk tata kelola pemerintahan yang lebih transparan, akuntabel, dan bertanggung jawab atas kebutuhan publik.

Meskipun evaluasi kebijakan dan praktik pemerintah sangat penting, masih ada banyak masalah dalam proses penerapannya, antara lain keterbatasan sumber daya dan kemampuan untuk melakukan evaluasi yang menyeluruh dan mendalam merupakan masalah utama. Kekurangan data yang baik dan sistem evaluasi yang tidak memadai juga merupakan hambatan dalam proses evaluasi. Kebijakan pemerintah biasanya memerlukan landasan faktual, sehingga penting untuk mengumpulkan bukti tentang suatu masalah dan melalui proses evaluasi dan penilaian data yang tersedia untuk sampai pada seperangkat keyakinan tentang bidang masalah tersebut. Masyarakat perlu pemahaman yang lebih baik mengenai proses ilmiah dan birokrasi yang digunakan oleh lembaga ilmiah pemerintah dan komite mereka untuk mengumpulkan dan menganalisis bukti mengenai masalah ini (Little, 2020). Akibat dari panjangnya proses evaluasi, tantangan tersebut diatas oleh pemerintah dengan mengambil keputusan melalui individu-individu tertentu yang mampu melakukan hal tersebut.

Menghadapi masalah ini, evaluasi kebijakan dan praktik pemerintah dalam upaya mewujudkan kesejahteraan dan kedamaian sosial dianggap sebagai langkah penting dalam memastikan kesuksesan dan kelangsungan pembangunan suatu negara. Dalam situasi seperti ini, pemerintah memiliki kesempatan untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi pencapaian tujuan kesejahteraan dan kedamaian sosial dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan, menggunakan pendekatan yang didasarkan pada nilai-nilai dasar, dan menggunakan pendekatan yang didasarkan pada bukti-bukti empiris, serta menghadapi berbagai tantangan yang mungkin timbul sepanjang proses evaluasi tersebut. Dengan melakukan hal-hal ini, pemerintah dapat memperbaiki kebijakan dan praktik mereka secara lebih sistematis dan terarah, yang akan menghasilkan peningkatan berkelanjutan dalam hal sosial dan ekonomi.

PENUTUP

Untuk mencapai kesejahteraan dan kedamaian sosial, pendekatan implementasi pemerintahan yang efektif sangat diperlukan. Pemerintah perlu menggunakan pendekatan yang menyeluruh dan berkelanjutan untuk membuat kebijakan dan program yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mempertahankan kedamaian sosial. Strategi-strategi ini termasuk meningkatkan kapasitas administrasi pemerintah, bekerja sama dengan

sektor swasta dan masyarakat sipil, dan koordinasi antarlembaga pemerintah. Dengan adanya rencana implementasi yang matang, pemerintah dapat memastikan bahwa layanan publik berjalan dengan baik dan efisien serta mencapai tujuan pembangunan yang berkelanjutan. Hal lain yang tidak kalah penting adalah melakukan evaluasi kebijakan dan praktik pemerintah dalam upaya mewujudkan kesejahteraan dan kedamaian sosial. Evaluasi ini tidak hanya bertujuan untuk menilai seberapa baik kebijakan dan praktik telah mencapai tujuan yang diinginkan, tetapi juga untuk menemukan kelemahan dan peluang untuk perbaikan. Melalui evaluasi yang berkelanjutan dan berbasis bukti, pemerintah dapat memperbaiki kebijakan dan praktiknya. Oleh karena itu, kita dapat terus bergerak menuju masyarakat yang aman dan sejahtera di mana semua orang menikmati hak-haknya secara merata, melalui pendekatan implementasi pemerintahan yang efektif dan evaluasi yang berkelanjutan terhadap kebijakan dan praktik pemerintah.

Untuk mencapai kesejahteraan dan keamanan sosial yang berkelanjutan, suatu negara harus melakukan evaluasi menyeluruh terhadap pendekatan yang digunakan untuk menerapkan tatanan pemerintahannya. Strategi yang dipilih untuk menerapkan tatanan pemerintahan memiliki dampak yang signifikan terhadap berbagai aspek kehidupan masyarakat, seperti stabilitas politik, penyebaran keadilan sosial, dan kemajuan ekonomi. Akibatnya, untuk menemukan solusi yang paling sesuai dengan karakteristik dan kebutuhan unik masyarakatnya sendiri, negara harus menggunakan pendekatan yang holistik dan berorientasi masa depan. Selain itu, negara harus mempertimbangkan berbagai pelajaran yang dapat dipetik dari pengalaman negara lain di seluruh dunia.

Negara dapat mengevaluasi berbagai model tatanan pemerintahan yang ada dengan melakukan analisis menyeluruh terhadap konteks internal dan eksternalnya. Kemudian, mereka dapat memilih model yang paling cocok dan efisien untuk mencapai tujuan kesejahteraan dan kedamaian sosial yang berkelanjutan. Untuk memastikan bahwa keputusan yang dibuat mencerminkan keinginan dan kepentingan semua pihak yang terlibat, pemerintah harus melibatkan berbagai pemangku kepentingan dalam proses ini, termasuk sektor swasta, masyarakat sipil, dan akademisi. Oleh karena itu, negara dapat membangun fondasi yang kokoh untuk pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan yang menguntungkan setiap warga negara untuk mewujudkan kesejahteraan dan kedamaian sosial.

DAFTAR PUSTAKA

- Badan Pusat Statistik. (2023). Indikator Kesejahteraan Rakyat 2023. Retrieved from <https://www.bps.go.id/id/publication/2023/11/06/7807339c2dfaed0ca8e0beaa/indikator-kesejahteraan-rakyat-2023.html>.
- Djumadi, Putra, P. P., Masruroh, Y. R., Syamsinar, Cahyawan, R., & Jailani, A. K. (2018). Penyelenggaraan Tata Pemerintahan yang Baik Di Lingkungan Pemerintah Kecamatan Di Kota Samarinda. *Jurnal Paradigma*, 7(1), 35-44.
- Husna, N. (2014). Ilmu Kesejahteraan Sosial dan Pekerjaan Sosial. *Jurnal Al-Bayan*, 20(1), 45-58. <http://dx.doi.org/10.22373/albayan.v20i29.114>
- Kadarisman, M. (2021). Dinamika Politik Dalam Reformasi Administrasi Publik. *KAIS Kajian Ilmu Sosial*, 2(1), 141-157.
- Kaynak, I., H. (2014). Importance And Meaning Of Social Peace In Terms Of Three Monotheistic Religious. *International Academic Conference*, 363-375.
- Kiswanto, E. (2005). Negara kesejahteraan (welfare state): Mengembalikan peran negara dalam pembangunan kesejahteraan sosial di Indonesia. *JKAP (Jurnal Kebijakan dan Administrasi Publik)*, 9(2), 91-108.
- Little, D. (2020). *A New Social Ontology of Government*. Springer International Publishing.
- Nagaring, D., D., Sambiran, S., Sumampow, I. (2021). Peran Pemerintah Dalam Mengatasi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) di Kota Manado (Studi Di Dinas Sosial Dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Manado). *Jurnal Governance*, 1(2), 1-9.
- Saito, Y. (2021). Is good governance a necessary precursor to peace?. United National Development Program. Retrieved from <https://www.undp.org/blog/good-governance-necessary-precursor-peace>
- Sari, D. C. (2020). *Manajemen Pemerintahan*. Ideas Publishing.
- Setiawan, R. (2017). Menjadikan Kesejahteraan Sebagai Isu Inti Demokrasi. *Indonesian Journal of Sociology and Education Policy*, 2(1), 110-115.
- Sukrisna, I., G., N., A., Sudibia, I., K., & Budiasa, I., G., S. (2018). Peran Pemerintah Dan Modal Sosial Terhadap Kesejahteraan Rumah Tangga Miskin Di Kecamatan Gerokgak Kabupaten Buleleng. *E-Jurnal Ekonomi dan Bisnis Universitas Udayana*, 7(10), 177-216.